

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka*, yang artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah berarti dapat diungkapkan dengan kata *zaka*. Apabila kalimat *zaka* dinisbahkan pada orang, biasanya bermakna *al-ishlah* yang artinya memiliki kebaikan yang berlebih.¹ Zakat merupakan salah satu rukun (tiang) Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu, hukum untuk menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan sebagainya. Yang dilakukan sendiri, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah gaji.³ Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴

¹ Muhammad Taufik Ridlo, "*Zakat Profesi dan Perusahaan*", BAMUIS BNI, Jakarta, 2003, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ Didin Hafidhuddin, "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*", Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 93.

⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

Menurut Ilmu fiqih, zakat profesi dapat dikatakan dengan istilah *al-mal al-mustafad* yang artinya zakat wajib dikeluarkan oleh seorang wiraswastawan atau pegawai negeri yang telah mencapai *nishab* meskipun belum mencapai setahun. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. Dengan begitu, jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya dan telah mencapai *nishabnya*, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir *haul*.⁵

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam ke tanah air, zakat merupakan salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Menurut Hazairin mengatakan bahwa dalam dunia perzakatan tidaklah lepas dengan adanya pengelolaan zakat karena pada hakikatnya zakat termasuk salah satu syari'at Islam yang harus dikelola oleh suatu pemerintahan agar mencapai tujuan dan manfaat dari zakat itu sendiri.⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, “Zakat Kajian Berbagai Mazhab”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 82.

⁶ M Jamal Doa, “Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara”, Nuansa Madani, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto dalam pidatonya mengenai anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi pada tanggal 20 Oktober 1968 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 yang masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal di Tingkat Nasional. Lalu, munculnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1999 adalah sebagai dasar hukum umat Islam di Indonesia untuk menunaikan zakat.⁷

Seiring perkembangan zakat di Indonesia, maka Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada prinsipnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hadir untuk lebih menata perzakatan di Indonesia mulai dari pengelolaan zakatnya yang amanah, profesional, akuntabel, dan partisipatif serta untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam berzakat. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berbunyi:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara muslim maupun badan usaha berlandaskan pada syariat Islam.

Kemudian pada pemerintahan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, maka Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 mendorong diselenggarakannya kegiatan pengumpulan zakat atas pendapatan gaji dari Pegawai yang beragama Islam (*Muzakki*). Mengenai pelaksanaannya pun telah ditentukan bahwa zakat profesi dari penghasilan pegawai akan diambil sebesar 2,5% dan dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh lingkungan instansi Pusat dan Daerah lalu disetorkan kepada BAZNAS setempat yang kemudian diberikan kepada para penerima zakat (*Mustahiq*).⁸

Amanat UU No. 23 Tahun 2011 yang ditindaklanjuti melalui PP No. 14 Tahun 2014 dan Inpres No. 3 Tahun 2014 melatarbelakangi dilakukannya kegiatan pengumpulan zakat profesi bagi seluruh pegawai di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kudus. Pada awal tahun 2017, pengumpulan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan berdasarkan adanya kenaikan realisasi penyerapan tunjangan

⁸ Panduan zakat, <http://baznas.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

penghasilan pegawai (TPP) yang mencapai Rp. 110.000.000.000,-. Dengan adanya kenaikan TPP para PNS tersebut, maka pada tahun tersebut Bupati Kudus mengadakan rapat pimpinan dengan seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kudus dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus mengenai kewajiban zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam melalui pemotongan TPP sebesar 2,5% yang dilakukan bendahara gaji pada masing-masing instansi dan sifatnya tidak mengikat atau tidak memaksa. Selanjutnya hasil dari rapat pimpinan tersebut diinformasikan oleh seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kudus dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus kepada para PNS melalui rapat internal di masing-masing instansi Kabupaten Kudus.⁹

Permasalahan yang kemudian muncul terhadap pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kudus sebagai lembaga amil zakat yang mengelola zakat di wilayah Kabupaten Kudus mengalami ketidakaktifan dalam kepengurusan selama tahun 2015 sampai awal tahun 2018 dan juga belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Kudus, sehingga pada masing-masing instansi di Kabupaten Kudus dalam menjalankan kegiatan pengumpulan zakat profesi tersebut dilakukan secara mandiri. Setelah kegiatan tersebut berjalan dan seluruh dana zakat profesi para PNS yang diambil 2,5% dari TPP terkumpul, maka masing-masing instansi di Kabupaten Kudus menyetorkan dana tersebut

⁹ Aris Samsul Ma'arif, "Wawancara Pribadi", Ketua BAZNAS Kabupaten Kudus, 11 Juli 2018, BAZNAS Kabupaten Kudus, Kudus.

lewat lembaga amil zakat yang telah ada seperti LAZIZNU dan LAZIZMU pada akhir tahun 2017.

Namun, beberapa instansi seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat DPRD di Kabupaten Kudus tetap menyimpan dana zakat profesi para PNS dan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus pada tahun 2018. Padahal, seharusnya dana zakat tersebut disetorkan pada akhir tahun 2017. Perlu diketahui bahwa penyetoran dana zakat profesi para PNS yang dilakukan pada tahun 2018 disebabkan lantaran pada tahun tersebutlah BAZDA Kabupaten Kudus mulai berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Kudus dan aktif kembali dalam kepengurusannya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kudus. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus guna meningkatkan manfaat zakat khususnya zakat profesi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, maka penelitian ini berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS.**

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Wahid, "Wawancara Pribadi", Bendahara gaji Kantor Kecamatan Jati kabupaten Kudus, 14 Juli 2018, Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Kudus.

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pada pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pada pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum, khususnya tentang Pengelolaan Zakat Profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus dan menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum mengenai zakat profesi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dapat diketahui mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan sebagaimana dalam bab I. Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari pengertian zakat secara umum, pengertian zakat profesi, landasan hukum kewajiban zakat profesi, syarat dan tata cara mengeluarkan zakat profesi, pengertian muzakki dan mustahiq, dan tujuan zakat profesi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian metode

penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas tentang kajian penelitian pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus yang meliputi : pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus dan upaya dalam mengatasi kendala pada pengelolaan zakat profesi bagi PNS di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian tersebut selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya.